



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **INDRAYUNITA**
2. Jabatan : **HAKIM**
3. NHK : **5049**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 817.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 115 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG PANJANG , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA ROKAN HULU, HASIL SENDIRI , Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 287 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI , Rp. 98.500.000
4. Tanah Seluas 289 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI , Rp. 98.500.000
5. Tanah Seluas 23.000 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
6. Tanah Seluas 13.000 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
7. Tanah Seluas 395 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 236.324.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 2.700.000
2. MOTOR, HONDA XIHOZN35MI Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000



3. MOBIL, INNOVA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 176.000.000
4. MOTOR, HONDA NEW SCOOPY SPORTY Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 20.664.000
5. MOTOR, HONDA BEAT STREET Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 19.460.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	20.008.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	36.342.055
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.109.674.055
III. HUTANG	Rp.	877.348.595
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	232.325.460

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.